BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
1.	Keiko Hubbansyah et al., (2023)	Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Cilegon: Peluang dan Tantangan	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dengan dua pendekatan. Pertama, mengidentifikasi masalah dan solusi pemberdayaan masyarakat. Kedua, menyusun strategi pengembangan kampung wisata.	Daya tarik wisata	Melalui pendekatan MAAMS, berhasil diidentifikasi sejumlah faktor permukaan yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi Bukit Teletubbies sebagai destinasi wisata di Kota Cilegon. Faktor-faktor tersebut mencakup ketiadaan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat setempat, keterbatasan modal dari para pemilik lahan, kondisi akses menuju lokasi yang melewati kawasan pemukiman padat, serta rendahnya literasi sumber daya manusia pengelola terhadap aspek manajerial dan teknologi. Berdasarkan hasil analisis MAAMS, akar dari permasalahan ini ditelusuri pada minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan sektor pariwisata secara berkelanjutan.
2.	Lestari et al., (2023)	Peran Pemerintah Terhadap Pengembang	Menggunakan pendekatan kualitatif	Pengembangan Pariwisata	Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Biak Numfor difokuskan pada empat

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
		an Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor			program inti, yakni pengembangan destinasi wisata, strategi pemasaran, penguatan kemitraan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Keempat aspek ini menjadi fondasi strategis bagi Dinas Pariwisata dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing objek wisata di wilayah tersebut. Melalui implementasi program-program tersebut, pemerintah daerah—bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan—telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengelola potensi pariwisata secara terarah. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi pariwisata, pelaku industri lokal, dan masyarakat telah berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik wisata, yang tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak Numfor.
3.	Lao et al., (2024)	Peran Masyarakat Lokal Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Desa Fatumnasi,	Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Fatumnasi	Implementasi Kebijakan Publik	Partisipasi masyarakat lokal di Desa Fatumnasi mencakup keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata. Bentuk

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
		Timor Tengah Selatan	dan melibatkan beberapa subjek penelitian termasuk informan utama yang merupakan pelaku usaha pariwisata di sana, petugas dari dinas pariwisata di sana, wisatawan yang berkunjung, dan masyarakat lokal (penduduk) yang tinggal di sekitar objek wisata.		partisipasi tersebut meliputi pengelolaan usaha akomodasi seperti penginapan, jasa penyewaan kuda, kegiatan usaha tenun ikat, pengolahan kuliner tradisional, serta aktivitas di bidang pertanian dan peternakan yang mendukung keberlangsungan pariwisata. Di samping itu, keterlibatan masyarakat juga tercermin melalui kontribusi mereka dalam proses perencanaan pengembangan pariwisata, seperti menyampaikan gagasan, usulan, dan masukan dalam forum-forum musyawarah, kelompok sadar wisata, serta pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Kendati memiliki akses untuk berpartisipasi, masyarakat setempat masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat kontribusi secara optimal, antara lain rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang relevan, serta kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai.
4.	Sukwika & Nurlestari, (2024)	Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjuta	Menggunakan metode deskriptif kualitatif yang	Sport tourism	Strategi yang berfokus pada pertumbuhan (*growth-oriented strategy*) dianggap

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
		n Sebagai The City of Sport Tourism di Kabupaten Bogor	didasarkan pada analisis SWOT yaitu strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman)		sebagai pendekatan yang paling tepat untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Dalam kondisi ini, salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah membangun strategi yang mampu menjadikan Kabupaten Bogor sebagai *The City of Sport Tourism* dengan cara meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata olahraga yang sudah ada. Upaya ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan olahraga, tetapi juga melibatkan promosi serta pengembangan berbagai jenis olahraga yang dapat menarik minat wisatawan. Selain itu, kolaborasi antara pelaku pariwisata seperti pengelola destinasi, agen perjalanan, komunitas olahraga lokal, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memiliki daya saing.
5.	Sinaga et al., (2021)	Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Pengembangan pariwisata	Ketiadaan penerapan prinsip-prinsip implementasi yang tepat menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata di wilayah

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
					tersebut. Salah satu elemen penting yang seharusnya mendukung keberhasilan dan efisiensi program adalah pemberdayaan masyarakat. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil masyarakat setempat. Berdasarkan hasil studi, selama proses implementasi ditemukan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya disposisi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan. Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mendukung proses pembangunan juga turut memperburuk situasi ini. Temuan dalam penelitian ini diketahui bahwa kebijakan yang telah ditetapkan sejak awal tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh, serta dipengaruhi oleh adanya ego sektoral antara kedua tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan perlu

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
					mengarah pada pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sektor pariwisata. Di sisi lain, untuk mengatasi hambatan koordinasi, komunikasi, dan disposisi, disarankan pembentukan unit khusus atau bidang pengembangan pariwisata di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Pantai Cermin, agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
6.	(Muawanah, U., Kurniasari, N., Soejarwo, P. A., & Yuliaty, 2020)	Peran Kepentingan Stakeholder dan Dukungan Kebijakan dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Budaya Bahari di Malaumkarta, Kabupaten Sorong	Dengan mengunakan analisis hierarki proses (AHP) dan analisis konten.	Wisata Bahari	Pengembangan wisata bahari di Malaumkarta merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal, yang melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten Sorong, serta Dewan dan Lembaga Adat setempat. Dukungan regulasi terhadap pengembangan ini tercermin dalam dua produk hukum daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
					tentang pengakuan dan perlindungan tradisi, serta Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan serta konservasi sumber daya laut di wilayah Malaumkarta. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh pemangku kepentingan baik yang bersifat utama, kunci, maupun pendukung perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat sinergi peran mereka dalam pengembangan pariwisata. Tindakan strategis yang direkomendasikan meliputi peningkatan koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD), pembangunan infrastruktur publik di kawasan wisata, serta penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat lokal guna meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam mendukung wisata bahari berbasis budaya lokal.
7.	Saputra & Ali, (2020)	Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Samosir	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk	Kebijakan pariwisata	Kebijakan pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Samosir dalam Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
			mengetahui analisis kebijakan pariwisata dalam pengelolaan objek wisata.		Wisata, sebenarnya membuka peluang besar untuk menciptakan sistem pengelolaan wisata yang lebih tertata dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghadirkan pengelolaan destinasi wisata yang lebih terorganisir, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata daerah. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen penting, seperti sinergi antar-pemangku kepentingan, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif semata, tetapi juga melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pelaku industri pariwisata. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, kebijakan ini tidak hanya akan berjalan lebih efektif, tetapi juga mampu memberikan dampak

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
					nyata bagi pertumbuhan sektor pariwisata di Samosir.
8.	Kusuma Sanjiwani & Putu Kerti Pujani, (2020)	Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali	Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menyelidiki dan memeriksa hukum yang berkaitan dengan pariwisata.	Teori otoritas, teori fungsional, konsep kebijakan, konsep agrowisata dan prinsip desentralisasi	Penelitian ini menemukan bahwa agrowisata memiliki potensi besar sebagai model bisnis pariwisata yang tepat untuk diterapkan di wilayah rawan letusan gunung berapi. Tidak hanya menawarkan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, pendekatan ini juga menjadi sarana strategis dalam membangun ketahanan masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan risiko bencana alam. Melalui kegiatan agrowisata, edukasi tentang bahaya vulkanik dan pentingnya mitigasi dapat disampaikan secara langsung dan kontekstual, sehingga masyarakat dan wisatawan terlibat aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana. Konsep ini menekankan pentingnya pengembangan pariwisata yang tidak hanya menarik dan berkelanjutan, tetapi juga aman secara lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
					lingkungan, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Penetapan pedoman dan batasan yang jelas menjadi penting agar aktivitas pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi penduduk setempat maupun ekosistem sekitar. Jika dirancang dengan bijak, agrowisata di kawasan rawan bencana dapat menjadi contoh nyata dari pariwisata yang sadar risiko, berwawasan lingkungan, dan berpihak pada keberlanjutan jangka panjang.
9.	Damiani Ngasi & Darmawan, (2024)	Integrasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dimana data-data hasil observasi atau data primer maupun data sekunder yakni wawancara dan artikel jurnal ilmiah yang diinterpretasi berdasarkan sudut pandang peneliti.	Kebijakan Pariwisata, Ekonomi Kreatif	Perbedaan kebijakan antara Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan telah menciptakan tantangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi, sekaligus memperumit kesiapan pemerintah untuk melakukan intervensi strategis. Kondisi ini mencerminkan bagaimana prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada masing-masing pemerintah daerah, dapat menjadi hambatan dalam upaya penyelarasan visi dan strategi pembangunan

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
					pariwisata di kedua wilayah tersebut. Di sisi lain, peran sektor swasta dalam investasi infrastruktur pariwisata, serta pentingnya regulasi pemerintah dalam membentuk arah dan lanskap pariwisata daerah, juga menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan sinergis antara seluruh tingkatan pemerintahan baik kota, kabupaten, maupun provinsi. Untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Tanjungpinang dan Bintan, pendekatan kebijakan yang lintas sektor harus diperkuat. Hal ini perlu didukung melalui dialog intensif, kolaborasi antarlembaga yang erat, dan kesadaran kolektif terhadap tujuan bersama dalam membangun industri pariwisata yang inklusif dan menguntungkan bagi semua pihak.
10.	Sururi, (2019)	Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata (Studi Kawasan	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara,	Inovasi Kebijakan	Hasil penelitian ini mengungkapkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekowisata Situterate Cikande. Meskipun kawasan ini memiliki potensi wisata

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
		Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)	observasi dan dokumentasi.		yang menjanjikan, partisipasi masyarakat dalam mempromosikan dan mengelola destinasi tersebut masih sangat minim. Temuan studi menunjukkan bahwa masyarakat kerap diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, tanpa keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, kesadaran mereka akan pentingnya peran aktif dalam pengembangan ekowisata pun masih rendah. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga pengembangan usaha pariwisata lokal. Keterlibatan yang lebih inklusif akan memperkuat rasa kepemilikan, memperluas manfaat ekonomi secara berkelanjutan, dan mendorong tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan ekowisata. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata Situterate Cikande perlu diarahkan melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat menjadi

No.	Penulis	Judul	Metode	Teori	Hasil
					aktor utama dalam setiap tahapan pengelolaan. Langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi penyelenggaraan pelatihan, pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan kelompok sadar wisata yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur administrasi negara Indonesia yang memegang peranan strategis dalam mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah desa berpedoman pada sejumlah prinsip tata kelola yang baik, termasuk kepastian hukum, keteraturan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pemerintah desa memiliki otonomi dalam menjalankan roda pemerintahannya, yang bersumber dari hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa. Otonomi ini mencakup kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa berdasarkan inisiatif lokal, nilai-nilai adat istiadat, dan tradisi yang hidup di masyarakat. Selain kewenangan yang melekat, pemerintah desa juga dapat menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah desa diarahkan untuk mendorong kemandirian dan pembangunan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk menjalankan perannya secara optimal dan menyeluruh, dengan pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan (Tui et al., 2023). Jenis peran yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai Fasilitator

   Dalam aspek pengembangan fasilitator pemerintah memegang peran dalam membangun dan meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata. Hal ini mencakup pembangunan jalan, penyediaan sarana transportasi yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Tujuannya adalah agar pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal dapat memberikan layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Di samping itu, pemerintah turut berkontribusi melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Upaya ini dilengkapi dengan strategi promosi yang dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti pameran pariwisata dan kampanye pemasaran di tingkat nasional maupun internasional.

2. Pemerintah sebagai Regulator

   Sebagai pemegang peran regulator pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana strategis pembangunan pariwisata nasional yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan destinasi wisata. Pemerintah juga memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin usaha pariwisata dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi yang berlaku. Dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan dan pelestarian, pemerintah menetapkan standar dan kriteria pembangunan destinasi wisata yang mempertimbangkan kapasitas lingkungan serta nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Selain itu, tanggung jawab pemerintah mencakup penetapan standar mutu layanan dan sistem sertifikasi usaha

pariwisata guna memastikan bahwa produk serta jasa yang ditawarkan memenuhi kualifikasi minimum yang diharapkan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama, dengan pemerintah menyusun standar kompetensi serta menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang relevan di sektor pariwisata. Di sisi lain, pemerintah memfasilitasi sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha swasta, dan instansi terkait, melalui berbagai bentuk kolaborasi. Pemberdayaan masyarakat menjadi agenda penting melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam mendukung kelangsungan industri pariwisata, pemerintah juga bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur, pengelolaan tata ruang destinasi wisata, serta promosi dan pemasaran untuk membangun citra positif destinasi. Aspek perlindungan konsumen turut menjadi perhatian, dengan langkah-langkah konkret untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan sistem penanganan keluhan wisatawan.

3. Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai dinamisator dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong partisipasi publik ketika muncul tantangan dalam proses pembangunan. Peran ini diwujudkan melalui pemberian arahan dan pembinaan yang intensif kepada masyarakat secara inklusif, tanpa membedakan latar belakang sosial. Melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah juga memainkan peran aktif dalam menumbuhkan ekonomi kreatif berbasis pariwisata yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat. Proses pemberdayaan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan partisipatif, seperti pengembangan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), penyediaan akses permodalan, pendampingan teknis, serta penguatan jejaring antar pelaku pariwisata lokal. Pemerintah tidak hanya memacu pertumbuhan pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat

dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah memberdayakan atau mendayagunakan masyarakat melalui beberapa cara lain, seperti:

a. Animasi Sosial

   Kemampuan individu yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat untuk menghidupkan kembali energi, inspirasi, dan semangat masyarakat. Ini termasuk mengaktifkan, mendorong, dan mengembangkan keinginan warga untuk bertindak.

b. Mediasi dan Negosiasi

   Seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediator untuk menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.

c. Pemberi Dukungan

   Peran pemuda di dalam masyarakat untuk membantu dan mendukung individu yang ingin terlibat dalam aktivitas dan struktur komunitas.

d. Fasilitas Kelompok

   Pemerintah desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan.

e. Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan

   Sebagai pihak yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah dituntut untuk mampu mengenali sekaligus mengelola potensi keterampilan serta sumber daya yang dimiliki oleh komunitas dan kelompok-kelompok yang ada. Perhatian yang konsisten terhadap kelompok-kelompok tersebut penting agar kapasitas dan kemampuan mereka dapat dikembangkan secara optimal.

f. Mengorganisasi

   Peran sebagai pihak perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat juga erat kaitannya dengan fungsi sebagai fasilitator, yang tidak hanya mendorong partisipasi tetapi juga menuntut kemampuan untuk mengorganisasi dan mengarahkan keterampilan yang dimiliki. Hal ini penting agar agen perubahan mampu berpikir secara sistematis mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses pemberdayaan tersebut.

2.2.2 Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kawasan wisata agar menjadi lebih menarik dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Tiga prinsip utama dalam pengembangan pariwisata antara lain:

1. Ecological sustainability

   Pengembangan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan keseimbangan ekologi, termasuk proses biologis dan keberagaman sumber daya alam yang ada, agar tidak merusak lingkungan yang menjadi bagian penting dari sistem tersebut.
2. Social and cultural sustainability

   Memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat setempat dan berdampak positif pada kehidupan masyarakat sekitar.
3. Economic sustainability

   Memastikan bahwa pengembangan berhasil secara ekonomis dan sumber daya dapat dipertahankan untuk kebutuhan di masa mendatang.

Prinsip keberlanjutan menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata modern. Entitas pemerintah, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dituntut untuk menyeimbangkan tiga aspek penting, yakni keuntungan ekonomi, konservasi lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dalam setiap inisiatif pengembangan destinasi wisata. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), konsep pariwisata berkelanjutan mencakup pertimbangan terhadap dampak ekonomi, sosial, serta budaya, baik dalam konteks saat ini maupun jangka panjang, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, pelaku industri pariwisata, lingkungan hidup, serta komunitas setempat (Harofah & Mutaqin, 2023). Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan pada dasarnya mencakup upaya menjaga lingkungan, melestarikan budaya setempat, memberdayakan masyarakat, serta memastikan keuntungan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak. Di sisi lain, agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar dan bersaing di tingkat global, pengembangan produk wisata juga harus didorong oleh ide-ide kreatif dan pendekatan yang inovatif.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, masyarakat lokal diberikan ruang untuk terlibat aktif dalam pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021, yang memuat pedoman pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan sebagai acuan dalam pengembangan wilayah wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa kriteria pariwisata berkelanjutan:

1. Mempertimbangkan secara menyeluruh dampak yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Memenuhi kebutuhan pengunjung, industri lingkungan, dan masyarakat setempat.
3. Melestarikan kebudayaan lokal, seperti seni, adat istiadat, dan arsitektur.
4. Membangun destinasi pariwisata secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pengembangan desa wisata secara berkelanjutan dapat dimulai dari adanya tekad yang kuat untuk memajukan desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Pendekatan pariwisata yang berkelanjutan memiliki peluang besar dalam mendorong peningkatan pendapatan asli desa serta memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ketika suatu daerah memilih untuk mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan, hal ini tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga berpotensi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh komunitas setempat. Sebagaimana dinyatakan oleh Farhan dan Anwar (2016), isu-isu utama yang terkait dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat diuraikan dan dipahami sebagai berikut:

1. Menjaga keberlanjutan peran pemangku kepentingan melalui peningkatan tanggung jawab korporasi terhadap pembangunan pariwisata.
2. Mewujudkan bentuk pariwisata yang sesuai dan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
3. Melestarikan keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lokal.
4. Menjamin kelestarian lingkungan alam sebagai bagian penting dari destinasi wisata.

5. Menyusun rencana pengembangan destinasi secara tepat untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.
6. Meningkatkan daya dukung lingkungan dan menggunakan indikator keberlanjutan sebagai panduan dalam pengembangan pariwisata.
7. Mendorong terciptanya keberlanjutan dengan meminimalkan potensi konflik antar pihak terkait.
8. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
9. Menetapkan arah pengembangan pariwisata yang jelas dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.

Pengembangan wisata sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada dengan mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Dengan memaksimalkan manfaat pariwisata untuk destinasi dan masyarakat lokalnya, pariwisata berkelanjutan berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Jika kepedulian masyarakat lokal terhadap lingkungannya meningkat, aktivitas budaya akan meningkat, yang akan berdampak positif baik pada penduduk lokal maupun wisatawan. Untuk mencapai pariwisata berkelanjutan, masyarakat lokal harus terus diberdayakan melalui pendidikan, komunikasi, dan persuasi yang positif. Ini diperlukan untuk menumbuhkan rasa hormat dan toleransi, kerja sama, perdamaian, dan pertukaran sosial budaya.

2.2.3 BUMDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. BUMDes dimiliki oleh desa, dengan modal awal berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan disertakan secara langsung. Kehadiran BUMDes menjadi pendekatan strategis dalam memperkuat perekonomian desa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan, potensi, dan karakteristik lokal. Diharapkan, BUMDes dapat tumbuh sebagai bentuk usaha yang dikelola oleh masyarakat secara produktif dan efisien. Seluruh

prosesnya berasal dari desa, dijalankan oleh masyarakat desa, dan hasilnya pun kembali untuk kemajuan desa itu sendiri, sehingga tanggung jawab atas pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan masyarakat desa. Menurut Susilowati, (2020) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya:

1. Kooperatif**:** Setiap elemen yang terlibat perlu menjalin kerja sama yang harmonis agar usaha dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.
2. Partisipatif: Semua pihak diharapkan terlibat secara sukarela, memberikan dukungan serta kontribusi nyata demi mendorong kemajuan BUMDes.
3. Emansipatif**:** Seluruh individu diperlakukan secara adil dan setara, tanpa membedakan latar belakang agama, kelompok, maupun etnis.
4. Transparan**:** Aktivitas BUMDes harus dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat, sehingga menciptakan keterbukaan informasi.
5. Akuntabel: Seluruh kegiatan operasional harus dapat dipertanggung jawabkan, baik secara administratif maupun moral, kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

BUMDes dalam konteks pengembangan ekonomi lokal menekankan pentingnya pengembangan potensi endogen suatu wilayah. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang efektif harus berbasis pada potensi lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Beberapa peran penting yang dimainkan BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal:

1. Pemberdayaan Masyarakat

   BUMDes berfungsi sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga desa. Melalui berbagai program dan kegiatan usaha, BUMDes memberi masyarakat peluang untuk terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan. Hal ini meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola bisnis.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

   Melalui berbagai kegiatan usaha yang dilakukannya, BUMDes memainkan peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai

badan usaha yang dikelola oleh desa, BUMDes menghasilkan pendapatan langsung. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini berdampak positif pada siklus ekonomi desa.

3. Pengembangan Infrastruktur

   BUMDes berperan dalam membangun infrastruktur desa. Usaha mereka biasanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, bersama dengan fasilitas umum lainnya. Dengan infrastruktur yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan bergerak. Ini akan memudahkan mereka untuk melakukan bisnis dan bertransaksi. Oleh karena itu, BUMDes berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa selain meningkatkan aspek ekonomi.

4. Pertumbuhan Ekonomi Desa

   BUMDes mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan membangun berbagai unit usaha yang memenuhi kebutuhan lokal. Lembaga ini termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengembangan pariwisata desa, dan pemberdayaan industri rumah tangga. BUMDes memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa melalui pengelolaan profesional.

2.2.4 Desa Wisata

Konsep desa wisata menggabungkan potensi desa dengan aktivitas pariwisata dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Desa wisata menawarkan pengalaman asli kepada wisatawan untuk merasakan kehidupan pedesaan, termasuk budaya, tradisi, aktivitas keseharian, kuliner lokal, dan keindahan alam pedesaan. Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan desa wisata. Agar dapat berfungsi optimal sebagai destinasi wisata, desa wisata perlu dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan memudahkan wisatawan dalam menjalankan berbagai aktivitas selama berkunjung. Idealnya, kawasan desa wisata memiliki infrastruktur dasar seperti transportasi, jaringan telekomunikasi, layanan kesehatan, serta akomodasi. Untuk memenuhi kebutuhan tempat

menginap, desa wisata dapat menyediakan homestay atau pondok wisata yang menawarkan pengalaman menginap dengan nuansa pedesaan yang asli atau autentik.

Pengembangan desa wisata berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan, sambil tetap menjaga kelestarian budaya tradisional dan lingkungan alam desa (Purwaningrum & Ahmad, 2021). Desa wisata memiliki beberapa konsep utama sebagai berikut.

1. Amenity (Fasilitas)

   Semua fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di desa wisata, termasuk ketersediaan penginapan dan restoran di desa wisata. Wisatawan mungkin juga membutuhkan hal-hal tambahan yang mungkin mereka butuhkan, seperti akomodasi, toilet umum, tempat parkir, klinik kesehatan, dan tempat ibadah.
2. Atraksi

   Seluruh aktivitas keseharian masyarakat desa serta lingkungan sekitarnya dapat menjadi daya tarik yang memungkinkan wisatawan terlibat secara langsung, misalnya melalui partisipasi dalam kelas tari, pembelajaran bahasa lokal, atau kegiatan budaya lainnya.
3. Aksesbilitas

   Infrastruktur dan sarana untuk menuju ke desa wisata. Akses jalan raya, ketersediaan transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan sangat penting untuk sebuah destinasi desa wisata.
4. Kelembagaan dan Community Involvement (Peran Masyarakat)

   Salah satu aspek penting dalam pengembangan desa wisata adalah masalah kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Ada banyak konsep dan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal (pemerintah dan masyarakat). Dalam pengembangan suatu desa wisata ada lima komponen dan pendekatan yang harus diperhatikan.

   a. Holistic approach

      Metode ini mempertimbangkan dimensi pembangunan secara menyeluruh. Metode ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai

bagian atau bidang pembangunan secara bersamaan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan masalah dan pemecahannya. Pendekatan berbasis sistem pemikiran digunakan untuk memperdalam pemahaman serta mendorong inovasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan yang relevan dan tepat sasaran.

b. Participatory learning

Dalam proses "belajar bersama", pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal harus dilakukan dengan partisipasi, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan menetapkan prioritas penanganan.

c. Empowerment of management

Pembelajaran partisipatif mencakup institusional dan individu. Pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif, baik dari individu maupun lembaga, menjadi kunci penting dalam proses penguatan kapasitas. Dari proses belajar inilah muncul pemahaman yang lebih dalam (pencerahan) dan kemampuan untuk mengambil tindakan nyata (pemberdayaan). Lembaga yang kuat bukan hanya dibentuk oleh struktur, tapi oleh orang-orang di dalamnya yang terus belajar dan berkembang. Dalam pengembangan desa wisata, manajemen kelembagaan yang mendorong semangat belajar dan memberdayakan semua pihak akan membuat proses pembangunan berjalan lebih hidup, adaptif, dan berkelanjutan.

d. Sinergy and network

Kesediaan untuk membuka jaringan dan bekerja sama dengan setiap bagian kelembagaan, baik yang ada di lingkungan pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun kelembagaan masyarakat dan bisnis, merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Sinergi dan jejaring bentuk upaya bersama untuk mewujudkan tugas dan menjawab tantangan pembangunan, menciptakan keseimbangan check and balance, dan menumbuhkan kepercayaan di antara pelaku pembangunan desa wisata.

Pengembangan desa wisata dilihat dari kemandirian desa yang bergantung pada keterlibatan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, semua lini masyarakat harus terlibat untuk memaksimalkan potensi desa. Pengembangan potensi desa bergantung pada seberapa siap masyarakat untuk melaksanakan program desa wisata. Kesiapan ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti nilai-nilai dan sikap masyarakat, iklim kerja, dukungan dari pemerintah daerah, keinginan setiap anggota masyarakat untuk berubah dan menerima perubahan, dan kelembagaan yang kuat untuk mengelola kegiatan desa wisata. Menurut Priasukmana dan Mulyadin dalam penelitian Artina et al.,(2020) penetapan suatu desa sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Desa memiliki aksesibilitas yang baik, memungkinkan wisatawan datang dengan berbagai jenis moda transportasi tanpa kesulitan.
2. Memiliki objek menarik seperti alam, seni, legenda, makanan lokal, sehingga menjadi tempat wisata.
3. Dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah desa menjadi kekuatan utama dalam mendorong pengembangan desa sebagai tujuan wisata.
4. Tingkat keamanan di desa terjaga dengan baik, sehingga wisatawan merasa nyaman dan aman selama berkunjung
5. Fasilitas seperti penginapan, jaringan komunikasi, serta ketersediaan tenaga kerja lokal sudah memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata
6. Memiliki iklim dan cuaca yang sejuk dan dingin. Iklim dan cuaca di desa cenderung sejuk dan menyegarkan, menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang mencari suasana berbeda.
7. Keberadaan objek wisata lain di sekitar desa yang sudah dikenal luas turut mendukung potensi desa sebagai bagian dari rute kunjungan wisatawan.